

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. (Mardiasmo, 2017, 108).

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di ikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain, dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan perencanaan dimaksud, pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah (Abdul Halim, 2018, 8).

Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tersebut diatas harus berpedoman dan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Abdul Halim, 2018:83).

Laporan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas pemerintahan dan sekaligus merupakan salah satu tolak ukur kinerja financial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sementara bagi pihak internal pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk penilaian kinerja (Chabib dan Heru, 2017).

Menurut Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, Kabupaten Ciamis merupakan Pemerintah Daerah yang wajib membuat atau mempertanggungjawabkan kegiatan ekonominya kepada semua entitas baik itu internal maupun eksternal. Bentuk pertanggungjawaban tersebut terwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan pemerintah daerah kabupaten Ciamis disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah), yang merupakan laporan keuangan gabungan dari Seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Ciamis.

Laporan Keuangan Pemerintah daerah untuk tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mendapat opini wajar. Opini ini di dapatkan pemerintah kabupaten Ciamis dari tahun 2018 -2020 dimana pada tahun 2018 laporan keuangan pemerintah daerah baru dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan oleh BPK, Akan tetapi pihak (BPKD) harus mengecek ulang laporan tersebut sebelum diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikarenakan sering terjadinya *error* dan terlambat memberikan laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzy, SE., M.Si. selaku ketua Akuntansi Belanja Langsung mengemukakan bahwa, fenomena diatas tidak luput dari masih kurangnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini disebabkan karena Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ciamis masih mengalami hambatan dalam penyusunan laporan keuangannya. Hambatan-hambatan yang dialami (BPKD) diantaranya, masih kurang efektifnya sistem aplikasi dalam pencatatan laporan keuangan sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan sering mengalami salah pencatatan atau *error*. Selain itu Sumber Daya manusia yang dimiliki (BPKD) Kabupaten Ciamis masih sangat kurang, baik dari Kualitas maupun kuantitas sehingga menyebabkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Dan pada akhirnya hambatan-hambatan ini mempengaruhi pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis khususnya Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk Tugas Akhir dengan judul:

“Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Belum efektifnya aplikasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Adanya hambatan – hambatan dalam penyusunan LKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis?
2. Apa saja hambatan - hambatan yang memperngaruhi LKPD Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Adapun Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan Keuangan pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Ciamis.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini selain sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja Adapun tujuan lain yang harus dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan yang baik.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan LKPD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Penelitian

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pihak perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan dan pengelolaan dengan masalah yang berkaitan dengan prosedur penyusunan laporan keuangan daerah.

1.5.2 Kegunaan Akademis

mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Camis. Sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait penyusunan laporan keuangan daerah. Mampu menerapkan ilmu yang didapatkan serta dapat mengaplikasikannya pada dunia kerja nanti. Juga dapat berguna untuk bahan referensi khususnya bagi pihak – pihak yang akan mengkaji topik yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan daerah.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Kuliah kerja praktek dilaksanakan di instansi pemerintah, yaitu Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Berikut ini adalah identitas lengkap tempat pelaksanaan kuliah kerja praktek :

Nama Badan : BPKD Kabupaten Ciamis

Alamat : Jl. Drs. H. Soejoed No.5, Kertasari, Kec. Ciamis,
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213

Telepon/Fax : (0265) 771032 - 773570

1.6.2 Waktu Penelitian

Tabel 1. 1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Keterangan	Bulan						
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
	I. Persiapan							
1.	Persiapan Judul							
2.	Persiapan Teori							
3.	Pengajuan Judul							
	II. Pelaksanaan							
1.	Mengajukan surat izin penelitian							
2.	Meminta surat penerimaan penelitian							
3.	Penelitian							
	III. Pelaporan							
1.	Bimbingan dan penyusunan							
2.	Penyerahan Laporan							

